SKRIPSI

KAPASITAS TARIU BORNEO BANGKULE RAJAKNG (TBBR) DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI POLITIK MASYARAKAT ADAT MENUJU TERBENTUKNYA KABUPATEN BANGKULE RAJAKNG

Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Ripka
NIM. E1051221005

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

KAPASITAS TARIU BORNEO BANGKULE RAJAKNG (TBBR) DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI POLITIK MASYARAKAT ADAT MENUJU TERBENTUKNYA KABUPATEN BANGKULE RAJAKNG

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Ripka
NIM. E1051221005

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

KAPASITAS TARIU BORNEO BANGKULE RAJANKG (TBBR) DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI POLITIK MASYARAKAT ADAT MENUJU TERBENTUKNYA KABUPATEN BANGKULE RAJANGK

Tanggung Jawab Yuridis Pada

Ripka
NIM.E1052221005

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Pertama

Dr. Saherimiko, M.Si
NIP 196605041995121001

Tanggal : 21/7-2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Fuzy Firda Zhan, M.Sos
NIP 199503282022032022

Tanggal : 2/7/2026

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

KAPASITAS TARIU BORNEO BANGKULE RAJAKNG (TBBR) DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI POLITIK MASYARAKAT ADAT MENUJU TERBENTUKNYA KABUPATEN BANGKULE RAJAKNG

Oleh:

Ripka
NIM.E1051221005

Dipertahankan di : FISIP UNTAN
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026
Waktu : 09.00-Selesai
Tempat : Ruang Sidang FISIP Untan

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Saherimiko, M.Si	**Fuzy Firda Zhan, M.S**
NIP.196605041995121001	**NIP. 199503282022032022**
Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dr. Erdi, M.Si	**Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si**
NIP. 19670727005011001	**NIP. 198506092051041002**

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kapasitas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) dalam memperjuangkan aspirasi politik masyarakat adat menuju terbentuknya Kabupaten Bangkule Rajakng sebagai daerah otonom baru. Latar belakang penelitian berakar dari kondisi ketertinggalan pembangunan, keterbatasan akses pelayanan publik, dan minimnya representasi politik masyarakat adat di enam kecamatan, yaitu Toho, Sadaniang, Menjalin, Mempawah Hulu, Sompak, dan Mandor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pisau analisis yang digunakan adalah Teori Kapasitas Organisasi yang dioperasionalisasikan melalui tiga dimensi, yaitu kapasitas konsolidasi aspirasi, kapasitas mobilisasi dukungan masyarakat, dan kapasitas advokasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TBBR memiliki kapasitas konsolidasi yang baik dalam menyatukan aspirasi lintas enam kecamatan melalui musyawarah adat dan pendekatan kultural. Kapasitas mobilisasi cukup efektif melalui sosialisasi langsung berbasis nilai budaya Dayak. Kapasitas advokasi dijalankan melalui komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan DPRD, meskipun terkendala regulasi pemekaran yang ketat dan moratorium daerah otonom baru. Hambatan utama mencakup keterbatasan finansial, terbatasnya kader ahli hukum, dan panjangnya proses birokrasi. Disarankan agar TBBR memperkuat diversifikasi pendanaan, meningkatkan kapasitas kader, dan memperluas jaringan advokasi. Pemerintah daerah diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat adat dalam proses pemekaran wilayah.

Kata Kunci: Kapasitas Organisasi, Tariu Borneo Bangkule Rajakng, Aspirasi Politik, Masyarakat Adat, Pemekaran Daerah.

ABSTRACT

This study examines the organizational capacity of Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) to articulate and advocate for the political aspirations of Indigenous communities toward establishing Bangkule Rajakng as a new autonomous region in West Kalimantan, Indonesia. The study was driven by persistent development disparities, limited access to public services, and inadequate political representation experienced by Indigenous communities across six sub-districts: Toho, Sadaniang, Menjalin, Mempawah Hulu, Sompak, and Mandor. Employing a descriptive qualitative approach, the study collected data through in-depth interviews and document analysis. Organizational Capacity Theory served as the analytical framework, focusing on three dimensions: the capacity to consolidate community aspirations, the capacity to mobilize public support, and the capacity for political advocacy. The findings demonstrate that TBBR possesses a strong capacity to consolidate diverse aspirations across the six sub-districts through customary deliberations and culturally embedded approaches. Its capacity to mobilize community support is relatively effective, particularly through direct engagement grounded in Dayak cultural values. TBBR's political advocacy is pursued through sustained communication and engagement with local government institutions and the Regional House of Representatives (DPRD). However, these efforts are constrained by stringent regulations governing regional expansion and by the ongoing moratorium on establishing new autonomous regions. Other significant constraints include limited financial resources, a shortage of cadres with legal expertise, and lengthy bureaucratic procedures. The study highlights that organizational capacity is shaped not only by internal resources but also by the ability to consolidate collective aspirations, mobilize community support, and navigate institutional and regulatory structures. The study recommends that TBBR diversify its funding sources, strengthen the legal and advocacy competencies of its cadres, and expand its advocacy networks. At the same time, local governments should provide more inclusive institutional space for Indigenous communities to articulate and participate in regional development and regional expansion processes.

Keywords: Organizational Capacity; Tariu Borneo Bangkule Rajakng; Political Aspirations; Indigenous Communities; Regional Expansion.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul ”Kapasitas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) dalam Memperjuangkan Aspirasi Politik Masyarakat Adat Menuju Terbentuknya Kabupaten Bangkule Rajakng”. Masyarakat adat Dayak di wilayah Bangkule Rajakng, Kalimantan Barat, memperjuangkan pembentukan Kabupaten Bangkule Rajakng sebagai daerah otonom baru akibat ketertinggalan pembangunan, minimnya akses pelayanan publik, dan lemahnya representasi politik di enam kecamatan: Toho, Sadaniang, Menjalin, Mempawah Hulu, Sompak, dan Mandor. TBBR menjadi aktor utama yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah melalui musyawarah adat, mobilisasi dukungan, dan advokasi kebijakan, meski dihadapkan pada keterbatasan internal dan regulasi pemekaran yang ketat.

Penelitian ini mengkaji bagaimana kapasitas TBBR dalam memperjuangkan dan mengartikulasikan aspirasi politik masyarakat adat menuju terbentuknya Kabupaten Bangkule Rajakng, mencakup kapasitas konsolidasi, mobilisasi, advokasi politik, serta hambatan yang dihadapi, dengan tujuan memperkaya kajian ilmu politik mengenai peran organisasi masyarakat adat dan menjadi bahan evaluasi bagi TBBR dalam memperkuat strategi perjuangannya.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di enam kecamatan basis TBBR, dengan subjek Ketua dan pengurus TBBR, anggota organisasi, serta tokoh adat dan masyarakat Dayak. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur dan studi dokumentasi, dianalisis dengan model Miles dan

Huberman, menggunakan Teori Kapasitas Organisasi yang dioperasionalkan ke dalam tiga dimensi: konsolidasi, mobilisasi, dan advokasi politik.

Hasil penelitian menunjukkan TBBR memiliki kapasitas konsolidasi yang baik melalui musyawarah adat dan legitimasi kultural, kapasitas mobilisasi yang cukup efektif melalui pendekatan budaya Dayak dan sosialisasi langsung, serta kapasitas advokasi yang aktif membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan DPRD, meski terhambat regulasi pemekaran yang ketat dan moratorium daerah otonom baru.

Tiga hambatan utama teridentifikasi: keterbatasan sumber daya finansial dan kader ahli hukum, sebagian masyarakat yang belum memahami urgensi pemekaran, serta proses birokrasi dan regulasi yang panjang, meski solidaritas sosial dan dukungan tokoh adat tetap menopang perjuangan TBBR. Penelitian menyarankan agar TBBR memformalisasi musyawarah adat lintas kecamatan, mendiversifikasi pendanaan, membina kader di bidang hukum dan kebijakan publik, serta memperluas jaringan advokasi; pemerintah daerah diharapkan lebih responsif, dan peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan kajian dengan pendekatan longitudinal.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Ripka
Nomor Mahasiswa	:	E1051221005
Program Studi	:	Ilmu Politik
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya asli saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di program studi, fakultas, atau perguruan tinggi lain. Selama pengetahuan saya, skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara jelas dirujuk dalam Daftar Pustaka di skripsi ini.

Pontianak, 30 Juli 2026
Yang membuat pernyataan



Ripka
NIM. E1051221005

Dipindai dengan CamScanner

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO:

"Jangan kuatir apa pun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu, sampaikanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur"

(Filipi 4:6)

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.

(Amsal 23:18)

Persembahan:

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi saya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, sahabat, serta teman saya yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini, terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib, alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal di balik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan

bangku perkuliahan, namun beliau mampu senantiasa memberikan yang terbaik. tak kenal lelah mendoakan, serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

2. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada ibunda tercinta, beliau adalah orang yang sangat saya cintai dan beliau juga alasan penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. terimakasih untuk setiap perhatian kecil mama yang selama ini di berikan kepada penulis. sehat terus mama, tunggu sampai ripka sarjana.
3. Kakak dan Abangku yang selalu menjadı alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang. Mereka yang membuat saya bisa bertahan selama kuliah, orang yang menjadikan penulis untuk menjadi kuat dan lebih semangat. terima kasih untuk setiap pengorbanan yang mereka berikan kepada penulis.
4. Kakak Keren Gloria Manein terima kasih selalu membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, karena penulis masih banyak belajar, serta sudah dengan sabar memberi arahan kepada penulis.
5. Windi terima kasih sudah menjadi teman serta sahabat penulis. sudah meluangkan waktu untuk sekadar mendengarkan cerita penulis dan memberikan penulis *support* agar tetap bisa bangkit walaupun dalam keadaan terpuruk sekali pun
6. Hestiana della terima kasih untuk *support* nya, selalu memberikan nasihat. penulis bangga bisa memiliki adik sepupu seperti dirimu.

7. Kepada Kedua Dosen penguji di yaitu bapak Dr.Erdi, M.Si dan juga bapak Herri Julius Nge, S.Sos,M.Si yang terlah bersedia memberikan arahan, kritik, serta saran nya terhadap penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat di buat sebaik mungkin.
8. dan terima kasih kepada diri sendiri yang selama ini mampu bertahan walaupun banyak rintangan. dengan kesabaran, akhirnya bisa mencapai titik akhir dari semua ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun proses penyelesaian Skripsi ini dengan mengangkat judul. *Kapasitas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Adat Menuju Terbentuknya Kabupaten Bangkule Rajakng.*

Dalam penulisan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, S. Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Wakil Dekan, Dosen beserta seluruh staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Herri Junius Nge, S, Sos, M.Si. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dan sekaligus Dosen penguji Kedua yang telah memberikan arahan, kritik, serta saran dalam penulisan Skripsi ini.
4. Dr. Erdi, M.Si Selaku Dosen Penguji Pertama yang telah memberikan arahan, kritik, serta saran dalam penulisan Skripsi ini.

5. Dr. Saherimiko, M. Si, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang juga telah memberikan arahan, kritik, saran serta kemudahan selama proses penulisan Skripsi ini.
6. Fuzy Firda Zhan, M. Sos, Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang juga telah memberikan arahan, kritik, saran serta kemudahan selama proses berlangsungnya proses penulisan Skripsi ini.
7. Agustinus Jilaha atau yang biasa di kenal sebagai Pangalima Jilah terimakasih telah bersedia menjadi informan di dalam skripai ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu penulis sehingga terselesaikan Skripsi ini.

Akhir kata diharapkan semoga Skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan bagi semua kalangan atau pihak yang membacanya. Untuk itu sangat diperlukan kritikan dan saran yang membangun guna/agar dapat memperbaiki segala bentuk kekurangan yang ada pada Skripsi ini untuk laporan yang mendatang dengan sebaik mungkin.

Pontianak, 29 Juni 2026

Ripka

NIM.E1051221005

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 10
1.3 Fokus Penelitian 11
1.4 Rumusan Masalah Penelitian 11
1.5 Tujuan Penelitian 11
1.6 Manfaat Penelitian 12
1.6.1 Manfaat Teoretis 12
1.6.2 Manfaat Praktis 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
2.1 Definisi Konsep 13
2.1.1 Kapasitas Organisasi Tariu Borneo Bangkule Rajakng 13
2.2 Teori 17
2.2.1 Kapasitas Organisasi dalam Kajian Teori Organisasi 17
2.2.2 Menyuarakan Aspirasi Dalam Bingkai Budaya Masyarakat 21
2.3 Hasil Penelitian Relevan 23
2.4 Alur Pikir Penelitian 28
2.5 Teori Pisau Analisis 30
2.6 Pertanyaan Penelitian 32

BAB III METODE PENELITIAN 34
3.1 Jenis Penelitian 34
3.2 Langkah-langkah Penelitian 36
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 37
3.3.1 Lokasi Penelitian 37
3.3.2 Waktu Penelitian 38
3.4 Subjek dan Objek 38
3.4.1 Subjek Penelitian 38
3.4.2 Objek Penelitian 39
3.5 Teknik Pengumpulan Data 40
3.6 Instrumen Atau Alat Pengumpulan Dat a 41
3.7 Keabsahan Data 43
3.8 Teknik Analisis Data 45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 48
4.1 Kondisi Geografis 48
4.1.1 Luas wilayah 48
4.1.2 Letak wilayah 49
4.1.3 Aksesibilitas dan Dampaknya terhadap Perjuangan Pemekaran 52
4.2 Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat 53
4.2.1 Kabupaten Mempawah (Kecamatan Toho dan Sadaniang) 53
4.2.2 Kabupaten Landak (Kecamatan Menjalin, Mempawah Hulu, Sompak, dan Mandor) 54
4.2.3 Kondisi Sosial-Ekonomi sebagai Konteks Perjuangan Pemekaran 54
4.3 Profil Organisasi Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) 55
4.3.1 Sejarah Berdiri dan Tujuan Organisasi 55
4.3.2 Struktur Kepengurusan dan Tata Kelola Organisasi 56
4.3.3 Fungsi dan Peran Strategis TBBR 56
4.4 Gambaran Umum Kondisi Ekonomi, Pendidikan, Kehidupan Politik, dan Tradisi 57

4.4.1 Kecamatan Toho 58
4.4.2 Kecamatan Sadaniang 61
4.4.3 Kecamatan Mempawah Hulu 64
4.4.4 Kecamatan Sompak 67
4.4.5 Kecamatan Menjalin 70
4.4.6 Kecamatan Mandor 73
4.5 Kondisi Sosial Politik, Budaya, dan Tradisi 78
4.5.1 Kehidupan Sosial dan Modal Sosial Masyarakat 78
4.5.2 Kehidupan Politik dan Partisipasi Masyarakat 78
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 81
5.1 Ketokohan dan Kelembagaan dalam Perjuangan TBBR 81
5.2 Hasil Penelitian 84
5.2.1 Kapasitas TBBR dalam Mengonsolidasikan Aspirasi Masyarakat Adat 84
5.2.2 Kapasitas TBBR dalam Memobilisasi Dukungan Masyarakat 86
5.2.3 Kapasitas TBBR dalam Melakukan Advokasi Politik 88
5.2.4 Hambatan yang Dihadapi TBBR 89
5.3 Pembahasan 91
5.3.1 Kapasitas Organisasi TBBR dalam Mengartikulasikan Aspirasi Politik (Dimensi Konsolidasi) 91
5.3.2 Kapasitas Mobilisasi Dukungan Masyarakat 92
5.3.3 Hambatan dalam Perjuangan Pembentukan Kabupaten Bangkule Rajakng 94
5.4 Kapasitas TBBR 95
5.5 Relasi Kekuasaan dalam Kapasitas TBBR 105
5.6 Gambaran Umum Pasukan TBBR 116
5.7 Wilayah dan Penduduk 127
5.8 Kondisi Masyarakat 145
5.8.1 Kecamatan Toho 147
5.8.2 Kecamatan Sadaniang 149

5.8.3 Kecamatan Mempawah Hulu 150
5.8.4 Kecamatan Sompak 152
5.8.5 Kecamatan Menjalin 154
5.8.6 Kecamatan Mandor 156
5.9 Sintesis Kondisi Ekonomi Enam Kecamatan 158
5.9.1 Kondisi Masyarakat dalam Perspektif Kapasitas TBBR 159
5.9.2 Layanan Publik Yang Jelek 162
5.9.3 Pelayanan Kesehatan yang Belum Memadai 164
5.9.4 Pelayanan Pendidikan yang Belum Merata 165
5.9.5 Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Lambat 167
5.9.6 Infrastruktur dan Transportasi yang Buruk 168
5.9.7 Sikap Aparatur dan Kepastian Pelayanan 169
5.9.8 Mekanisme Pengaduan yang Belum Efektif 170
5.10 Kapasitas TBBR dalam Mengonsolidasikan Aspirasi Masyarakat Adat 171
5.11 Kapasitas TBBR dalam Memobilisasi Dukungan 172
5.12 Kapasitas TBBR dalam Melakukan Advokasi Politik 173
BAB VI PENUTUP 175
6.1 Simpulan 175
6.2 Saran 178
6.3 Keterbatasan Penelitian 180
DAFTAR PUSTAKA 183

DAFTAR TABEL

3.1 Waktu Penelitian 38
4.1 Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Toho 58
4.2 Kondisi Pendidikan Kecamatan Toho 60
4.3 Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Sadaniang 62
4.4 Kondisi Pendidikan Kecamatan Sadaniang 63
4.5 Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Mempawah Hulu 65
4.6 Kondisi Pendidikan Kecamatan Mempawah Hulu 66
4.7 Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Sompak 68
4.8 Kondisi Pendidikan Kecamatan Sompak 69
4.9 Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Menjalin 71
4.10 Kondisi Pendidikan Kecamatan Menjalin 72
4.11 Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Mandor 74
4.12 Kondisi Pendidikan Kecamatan Mandor 75

DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan Alur Pikir Penelitian 29
5.1 Dokumentasi Asli Pada Saat Acara Bahaump Bide Bahana III Tahun 2026 105
5.2 Kunjungan Presiden 116
5.3 Pasukan TBBR 127
5.4 Wilayah yang dikuasai oleh Kabupaten Bangkule Rajangk 145
5.5 Kondisi Masyarakat di Kab. Mempawh dan Kab. Landak 157
5.6 Layanan Publik di Kab. Mempawah dan Kab. Landak 164

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian/ Pengantar Penelitian 189
Lampiran 2 Pedoman Wawancara 190
1. Pedoman Wawancara untuk Ketua TBBR 190
2. Pedoman Wawancara untuk Pengurus TBBR 191
3. Pedoman Wawancara untuk Tokoh Adat 192
4. Pedoman Wawancara untuk Masyarakat Adat 193
5. Pedoman Wawancara untuk Anggota TBBR 195
Lampiran 3 Daftar Informan/Narasumber 196
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara 197
Lampiran 5 Biodata Peneliti 199

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas keragaman suku, budaya, dan sistem sosial yang hidup dan berkembang jauh sebelum negara ini terbentuk (Sati, 2019). Salah satu elemen penting dalam keragaman tersebut adalah keberadaan masyarakat adat yang hingga kini masih mempertahankan identitas, nilai, dan sistem sosial-politik tradisionalnya. Masyarakat adat tidak hanya menjadi subjek budaya, tetapi juga aktor politik yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan wilayah, sumber daya alam, serta tata pemerintahan yang adil dan berpihak pada kepentingan mereka (Pamungkas dkk. 2023).

Dalam konteks ini, perjuangan masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan politik dan wilayah administratif sendiri menjadi fenomena yang terus berlangsung di berbag ai daerah di Indonesia, termasuk konflik sumber daya dan perampasan tanah adat yang mencerminkan kurangnya rekognisi hukum (Azis dkk. 2023).

Provinsi Kalimantan Barat, sebagai salah satu wilayah yang kaya akan keberagaman masyarakat adat Dayak, menyimpan dinamika politik lokal yang unik. Di wilayah ini masyarakat adat tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang aktif memperjuangkan hak-haknya, baik melalui strategi mobilisasi sosial maupun advokasi normatif untuk mempertahankan hak ulayat dan pengakuan identitas mereka (Sinabutar, 2021).

Salah satu contoh nyata dari dinamika tersebut adalah perjuangan masyarakat adat di wilayah Bangkule Rajakng yang mengupayakan terbentuknya Kabupaten Bangkule Rajakng sebagai daerah otonom baru. Perjuangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai aktor adat, tokoh masyarakat, serta organisasi adat yang memiliki pengaruh kuat di tingkat lokal, dan seringkali berhadapan dengan tatanan hukum nasional yang belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan dan hak adat (Mulyadi dkk. 2023).

Dalam proses perjuangan pembentukan daerah otonom baru, Tariu Borneo Bangkule Rajakng muncul sebagai salah satu aktor utama yang memiliki peran strategis. Tariu Borneo pada dasarnya merupakan organisasi adat Dayak yang dikenal luas di Kalimantan sebagai wadah solidaritas, advokasi, dan perjuangan hak-hak masyarakat adat. Di Bangkule Rajakng, organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol persatuan adat, tetapi juga sebagai instrumen politik kultural yang mampu mengartikulasikan aspirasi masyarakat adat ke dalam ruang-ruang politik formal. Fenomena keterlibatan Tariu Borneo Bangkule Rajakng dalam memperjuangkan aspirasi politik masyarakat adat menunjukkan adanya pergeseran pola perjuangan masyarakat adat dari defensif semata terhadap ancaman pengambilalihan sumber daya menjadi strategi politik yang memanfaatkan mobilisasi sosial dan advokasi kebijakan publik (Sari dan Harakan, 2015).

Kapasitas Tariu Borneo Bangkule Rajakng dalam memperjuangkan aspirasi politik masyarakat adat menjadi aspek yang sangat menarik untuk dikaji. Kapasitas di sini tidak hanya dipahami sebagai kemampuan organisasi secara

struktural, tetapi juga mencakup kemampuan kepemimpinan, legitimasi sosial, penguasaan isu, serta strategi advokasi yang digunakan (Sejati dan Kartono, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki posisi politik yang kompleks di mana posisi mereka sering dirugikan oleh hukum nasional tetapi tetap melakukan strategi sosial untuk menegosiasikan hak mereka (Werang dkk. 2024).

Secara empiris, perjuangan pembentukan Kabupaten Bangkule Rajakng memperlihatkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat adat dan kebijakan pemerintah. Masyarakat adat Bangkule Rajakng memandang pemekaran wilayah sebagai solusi atas ketertinggalan pembangunan, keterbatasan akses pelayanan publik, serta minimnya representasi politik mereka dalam struktur pemerintahan daerah induk, kondisi yang juga dialami oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia yang menghadapi hambatan dalam memenuhi hak politik mereka secara penuh (Pamungkas dkk. 2023). Aspirasi ini tumbuh dari pengalaman nyata masyarakat yang merasa terpinggirkan secara geografis maupun politis. Jarak yang jauh dari pusat pemerintahan, kondisi infrastruktur yang terbatas, serta kurangnya perhatian terhadap wilayah adat menjadi alasan kuat munculnya tuntutan pemekaran.

Dalam kondisi tersebut, Tariu Borneo Bangkule Rajakng berperan sebagai jembatan antara masyarakat adat dan pemerintah. Organisasi ini mengonsolidasikan aspirasi masyarakat melalui musyawarah adat, pertemuan tokoh-tokoh masyarakat, serta aksi-aksi kolektif yang terorganisir. Fenomena ini menunjukkan bahwa Tariu Borneo Bangkule Rajakng tidak hanya berfungsi

sebagai organisasi kultural, tetapi organisasi seperti ini juga sebagai aktor politik non-negara yang memiliki kapasitas mobilisasi dan negosiasi yang signifikan.

Namun demikian, perjuangan politik masyarakat adat melalui organisasi adat seperti Tariu Borneo Bangkule Rajakng tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan internal seperti perbedaan pandangan antartutur adat serta keterbatasan sumber daya organisasi, serta tantangan eksternal dari regulasi pemerintah yang ketat dan kepentingan politik elite lokal (Sejati dan Kartono, 2024). Fenomena nyata lainnya yang dapat diamati adalah bagaimana organisasi adat memanfaatkan simbol-simbol adat dalam memperkuat legitimasi perjuangan politiknya, menunjukkan bahwa strategi kebudayaan menjadi bagian penting dari mobilisasi politik kolektif masyarakat adat (Sari dan Harakan, 2015).

Di sisi lain, keterlibatan Tariu Borneo Bangkule Rajakng dalam arena politik juga memunculkan dilema tersendiri karena risiko politisasi adat, di mana nilai-nilai adaptif dapat tereduksi menjadi alat legitimasi politik semata, sebuah dinamika yang mencerminkan tantangan global bagi gerakan masyarakat adat dalam mempertahankan otonomi dan identitas mereka (Pikoli dkk. 2022). Dengan demikian, perjuangan pembentukan Kabupaten Bangkule Rajakng bukan hanya persoalan administratif semata, melainkan merupakan manifestasi dari aspirasi politik masyarakat adat yang diperjuangkan melalui kapasitas organisasi adat dalam realitas politik lokal yang hidup, dinamis, dan berakar kuat pada pengalaman nyata masyarakat adat Bangkule Rajakng.

Perjuangan pembentukan daerah otonom baru di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kebijakan desentralisasi yang bergulir sejak awal era reformasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagi daerah-daerah untuk memekarkan wilayahnya sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Semangat desentralisasi ini pada mulanya melahirkan ratusan daerah otonom baru di berbagai penjuru Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, sebelum pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran daerah sejak tahun 2014 karena pertimbangan efisiensi anggaran dan evaluasi menyeluruh terhadap daerah otonom baru yang telah terbentuk sebelumnya. Kebijakan moratorium tersebut pada gilirannya menempatkan daerah-daerah yang tengah memperjuangkan pemekaran, termasuk wacana pembentukan Kabupaten Bangkule Rajakng, pada posisi yang serba tidak pasti secara regulatif maupun politis.

Ketidakpastian regulatif tersebut tidak lantas memadamkan aspirasi masyarakat di daerah pinggiran untuk terus memperjuangkan pengakuan atas eksistensi wilayah dan identitas mereka. Migdal (1988) menjelaskan bahwa relasi antara negara dan masyarakat bersifat dinamis, di mana masyarakat lokal senantiasa memiliki ruang tawar untuk memengaruhi kebijakan negara melalui berbagai bentuk mobilisasi sosial-politik, sekalipun negara memiliki otoritas formal untuk menentukan kebijakan administratif wilayah. Dalam konteks inilah, perjuangan pemekaran Kabupaten Bangkule Rajakng dapat dibaca sebagai bagian

dari negosiasi berkelanjutan antara masyarakat adat di wilayah pinggiran dengan negara, di mana organisasi adat berperan sebagai medium artikulasi kepentingan kolektif yang tidak selalu terakomodasi dalam struktur pemerintahan daerah induk.

Kalimantan Barat sendiri dikenal sebagai provinsi dengan keragaman etnis Dayak yang tinggi, terdiri atas puluhan sub-suku dengan sistem hukum adat, struktur kepemimpinan, dan praktik budaya yang beragam namun tetap terikat oleh nilai-nilai kolektif seperti musyawarah adat dan gotong royong. Modal sosial yang terbangun melalui jaringan kekerabatan dan lembaga adat ini, sebagaimana dikemukakan Putnam (1993), menjadi salah satu sumber daya penting yang memungkinkan masyarakat adat melakukan aksi kolektif secara terkoordinasi, termasuk dalam memperjuangkan kepentingan politik mereka. Modal sosial tersebut menjadi salah satu kekuatan utama yang dimanfaatkan oleh Tariu Borneo Bangkule Rajakng dalam mengonsolidasikan dukungan lintas kecamatan bagi perjuangan pemekaran wilayah.

Tariu Borneo sebagai jejaring solidaritas adat Dayak sesungguhnya telah lama dikenal di berbagai wilayah Kalimantan sebagai wadah yang menghimpun tokoh-tokoh adat untuk merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Dayak, mulai dari sengketa tanah ulayat hingga isu representasi politik. Di wilayah Bangkule Rajakng, semangat solidaritas tersebut kemudian mengkristal menjadi organisasi yang lebih terfokus, yaitu Tariu Borneo Bangkule Rajakng, yang secara khusus dibentuk untuk mewadahi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat adat di enam kecamatan menuju terbentuknya daerah otonom baru.

Pembentukan organisasi ini tidak terlepas dari kesadaran kolektif masyarakat bahwa perjuangan yang terserak tanpa koordinasi yang jelas akan sulit menghasilkan tekanan politik yang berarti terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Wilayah yang menjadi basis perjuangan Tariu Borneo Bangkule Rajakng mencakup enam kecamatan yang tersebar di dua kabupaten induk, yaitu Kecamatan Toho dan Sadaniang yang berada di bawah administrasi Kabupaten Mempawah, serta Kecamatan Menjalin, Mempawah Hulu, Sompak, dan Mandor yang berada di bawah administrasi Kabupaten Landak. Kondisi geografis yang berjauhan dari pusat pemerintahan kabupaten induk, ditambah dengan keterbatasan infrastruktur jalan dan transportasi antarkecamatan, menjadi salah satu faktor struktural yang memperkuat aspirasi masyarakat untuk memiliki daerah otonom tersendiri. Kesenjangan pembangunan antara wilayah basis TBBR dengan pusat kabupaten induk turut memperlihatkan bagaimana pola pembangunan yang tersentralisasi pada ibu kota kabupaten cenderung meminggirkan wilayah-wilayah yang secara geografis maupun kultural memiliki karakteristik yang berbeda.

Dalam kerangka teori gerakan sosial, Tarrow (1998) menekankan pentingnya struktur peluang politik (political opportunity structure) dalam menentukan keberhasilan suatu gerakan kolektif untuk mencapai tujuannya. Struktur peluang politik ini mencakup keterbukaan sistem politik, keberadaan sekutu-sekutu politik, serta kapasitas negara dalam merespons tuntutan masyarakat. Dalam konteks perjuangan Tariu Borneo Bangkule Rajakng, struktur

peluang politik yang tersedia relatif terbatas akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah, sehingga organisasi ini dituntut untuk mengembangkan repertoar aksi kolektif yang variatif, mulai dari musyawarah adat, audiensi dengan pemerintah daerah, hingga penyampaian aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar perjuangan pemekaran tetap mendapatkan momentum politik meskipun berada dalam iklim regulasi yang tidak kondusif.

Dinamika elite lokal pascadesentralisasi turut memberikan pengaruh signifikan terhadap arah perjuangan pemekaran daerah. Hadiz (2010) mencatat bahwa desentralisasi di Indonesia tidak selalu menghasilkan demokratisasi substantif di tingkat lokal, melainkan kerap kali direproduksi oleh elite-elite lama yang beradaptasi dengan struktur kekuasaan baru untuk mempertahankan basis kekuasaan mereka. Kondisi ini turut memengaruhi bagaimana aspirasi pemekaran Kabupaten Bangkule Rajakng direspons oleh elite politik di kabupaten induk, yang tidak jarang memiliki kepentingan berbeda terhadap wacana pemekaran karena berkaitan dengan potensi hilangnya sebagian wilayah, sumber daya, maupun basis konstituen politik. Situasi ini menempatkan Tariu Borneo Bangkule Rajakng pada posisi yang harus secara cermat mengelola relasi dengan berbagai aktor politik lokal agar perjuangan pemekaran tidak terjebak dalam kepentingan elite semata.

Selain berhadapan dengan dinamika elite lokal, perjuangan masyarakat adat Bangkule Rajakng juga tidak terlepas dari persoalan politik pengakuan (politics of recognition) yang lebih luas dialami oleh masyarakat adat di berbagai belahan dunia. Fox (2011) dan Li (2010) menunjukkan bahwa masyarakat adat

kerap kali harus memperjuangkan pengakuan negara atas eksistensi, wilayah, dan hak-hak kolektif mereka melalui proses politik yang panjang dan tidak jarang penuh dengan negosiasi rumit antara identitas kultural dan kepentingan administratif negara. Perjuangan pembentukan Kabupaten Bangkule Rajakng, dengan demikian, tidak semata-mata merupakan tuntutan administratif untuk pemekaran wilayah, melainkan juga merupakan bagian dari upaya masyarakat adat Dayak untuk memperoleh pengakuan politik yang lebih substantif atas keberadaan dan kontribusi mereka dalam struktur kenegaraan.

Kajian-kajian terdahulu mengenai gerakan masyarakat adat di Indonesia umumnya lebih banyak berfokus pada isu konflik agraria, perebutan sumber daya alam, maupun advokasi hak ulayat secara umum, sementara kajian yang secara spesifik menyoroti kapasitas organisasi adat dalam memperjuangkan pemekaran daerah otonom baru masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian mengenai pemekaran daerah pun cenderung lebih banyak menyoroti aspek kebijakan, ekonomi fiskal, maupun evaluasi pascapemekaran, dan belum banyak yang menempatkan organisasi masyarakat adat sebagai unit analisis utama dalam menjelaskan dinamika perjuangan pemekaran di tingkat lokal. Kesenjangan inilah yang mendorong pentingnya penelitian yang secara khusus mengkaji kapasitas organisasi Tariu Borneo Bangkule Rajakng, dengan menempatkan tiga dimensi kapasitas organisasi, yaitu konsolidasi, mobilisasi, dan advokasi politik, sebagai kerangka analisis utama untuk memahami bagaimana organisasi adat mengelola perjuangan politiknya di tengah keterbatasan struktur peluang politik yang tersedia.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan peran organisasi masyarakat sipil non-negara dalam mengartikulasikan kepentingan politik kelompok minoritas atau kelompok pinggiran di tingkat lokal. Secara praktis, pemahaman yang mendalam mengenai kapasitas organisasi Tariu Borneo Bangkule Rajakng diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat adat, khususnya dalam konteks wilayah-wilayah yang secara geografis dan kultural memiliki karakteristik khas namun kerap kali termarjinalkan dari pusat pengambilan kebijakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana kapasitas organisasi Tariu Borneo Bangkule Rajakng dalam mengonsolidasikan aspirasi, memobilisasi dukungan, dan melakukan advokasi politik guna memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Bangkule Rajakng sebagai daerah otonom baru, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan internal maupun eksternal yang dihadapi organisasi tersebut dalam menjalankan peran strategisnya. Dengan kerangka pemikiran tersebut, peneliti merumuskan sejumlah identifikasi masalah sebagai berikut.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya kapasitas Tariu Borneo Bangkule Rajakng dalam mengonsolidasikan dan memperjuangkan aspirasi politik masyarakat adat secara efektif menuju terbentuknya Kabupaten Bangkule Rajakng.

2. Masih lemahnya dukungan dan pengakuan politik dari pemerintah terhadap aspirasi masyarakat adat Bangkule Rajakng dalam proses pembentukan daerah otonom baru.
3. Adanya berbagai kendala internal dan eksternal, seperti keterbatasan sumber daya organisasi, perbedaan kepentingan internal, serta dinamika politik lokal, yang memengaruhi perjuangan Tariu Borneo Bangkule Rajakng.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kapasitas Tariu Borneo Bangkule Rajakng dalam memperjuangkan dan mengartikulasikan aspirasi politik masyarakat adat menuju terbentuknya Kabupaten Bangkule Rajakng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana kapasitas Tariu Borneo Bangkule Rajakng dalam memperjuangkan dan mengartikulasikan aspirasi politik masyarakat adat menuju terbentuknya Kabupaten Bangkule Rajakng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapasitas Tariu Borneo Bangkule Rajakng dalam memperjuangkan dan mengartikulasikan aspirasi politik masyarakat adat menuju terbentuknya Kabupaten Bangkule Rajakng.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan ilmu politik khususnya dalam kajian aspirasi.

1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya mengenai peran dan kapasitas organisasi masyarakat adat dalam memperjuangkan aspirasi politik di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami dinamika politik masyarakat adat dalam proses pembentukan daerah otonom baru di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Tariu Borneo Bangkule Rajakng

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam memperkuat kapasitas organisasi serta strategi perjuangan aspirasi politik masyarakat adat

2. Bagi masyarakat adat Bangkule Rajakng

   Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai posisi dan peran organisasi adat dalam memperjuangkan kepentingan politik bersama.